



## Efektivitas Fungsi Organizing Dalam Program Kampung Iklim (Proklim) Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo

Reza Pramana<sup>1)</sup>, Syafruddin<sup>2)</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [Rezapramana4502@gmail.com](mailto:Rezapramana4502@gmail.com)<sup>1)</sup>

Email: [syafruddin@umsu.ac.id](mailto:syafruddin@umsu.ac.id)<sup>2)</sup>

### Abstrak

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia dalam mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fungsi organizing dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup serta pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi organizing telah diterapkan melalui pembagian tugas, koordinasi, komunikasi, serta pengarahan pimpinan. Namun demikian, efektivitas organizing belum optimal karena masih terdapat pembagian tugas yang belum terintegrasi, koordinasi antarinstansi yang belum berkelanjutan, serta pelaksanaan program yang belum merata pada seluruh aspek ProKlim. Program ini telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dan pengelolaan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah. Penguatan koordinasi organisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

**Kata kunci:** Fungsi Organizing; Program Kampung Iklim; Efektivitas Organisasi; Lingkungan Hidup.

### Abstract

*The Climate Village Program (ProKlim) is a strategic initiative of the Indonesian government aimed at strengthening community-based climate change mitigation and adaptation. This study aims to analyze the effectiveness of the organizing function in implementing the Climate Village Program at the Environmental Service of Karo Regency. This study uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Informants consisted of officials and staff of the Environmental Service and stakeholders involved in the program. The results showed that the organizing function has been implemented through task division, coordination, communication, and leadership direction. However, the effectiveness of organizing is not yet optimal due to unclear task distribution among internal units, limited coordination between institutions, and uneven implementation of program activities. The program has contributed positively, especially in improving environmental awareness and waste management. Strengthening organizational coordination and community participation is necessary to ensure the sustainability and effectiveness of the program.*

**Keywords:** Organizing Function; Climate Village Program; Environmental Management; Organizational Effectiveness.



## PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas lingkungan, sosial, dan ekonomi, termasuk pada tingkat daerah. Dampak perubahan iklim tidak hanya ditandai oleh peningkatan suhu, tetapi juga perubahan pola curah hujan, meningkatnya risiko bencana lingkungan, serta menurunnya kualitas ekosistem. Kondisi ini menuntut adanya upaya adaptasi dan mitigasi yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Sebagai bentuk komitmen nasional dalam menghadapi perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginisiasi

Program Kampung Iklim (ProKlim), yaitu program berbasis partisipasi masyarakat yang bertujuan meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat local (KLHK, 2024). Program Kampung Iklim (ProKlim) memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan peran pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran, pelestarian lingkungan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 secara khusus mengatur tentang pelaksanaan ProKlim, termasuk mekanisme pembinaan, pelaksanaan, dan evaluasi program di tingkat daerah. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa ProKlim merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam mendukung pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim (KLHK, 2016).

Pada tingkat daerah, implementasi ProKlim dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup. Di Kabupaten Karo, pelaksanaan program ini dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah. Kabupaten Karo memiliki karakteristik geografis berupa wilayah pegunungan, lahan pertanian hortikultura, serta kawasan wisata seperti Berastagi dan Kabanjahe yang memiliki potensi sekaligus kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, ProKlim menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya, efektivitas ProKlim di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek pengorganisasian (organizing). Struktur organisasi pelaksana program belum sepenuhnya menunjukkan pembagian peran yang jelas, sementara koordinasi lintas instansi dan antar pemangku kepentingan belum berjalan secara optimal. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan ProKlim cenderung belum terintegrasi secara menyeluruh dan masih berfokus pada kegiatan tertentu, seperti pengelolaan sampah, sementara aspek lain seperti konservasi air, efisiensi energi, dan penghijauan belum dilaksanakan secara optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Suciasih dkk. (2024) menunjukkan bahwa implementasi ProKlim di berbagai daerah masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi antarinstansi dan terbatasnya kapasitas organisasi pelaksana di tingkat daerah.

Secara teoritis, fungsi organizing dalam administrasi publik merupakan proses pengaturan sumber daya organisasi, pembagian tugas, penetapan struktur kerja, serta pembangunan mekanisme koordinasi guna mencapai tujuan organisasi secara efektif (Rainey, 2015). Fungsi organizing berperan penting dalam memastikan adanya kejelasan peran, koordinasi yang efektif, serta integrasi kerja antar unit organisasi dan pemangku kepentingan. Organizing yang efektif memungkinkan organisasi publik menjalankan program secara terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan, sedangkan lemahnya fungsi organizing dapat menyebabkan fragmentasi kerja, tumpang tindih kewenangan, serta rendahnya efektivitas program.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program lingkungan berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh efektivitas fungsi organizing, terutama dalam aspek koordinasi, pembagian peran, dan integrasi kerja antar pemangku kepentingan (Putri & Hadi, 2022; Purwanto & Hidayat, 2022). Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas fungsi organizing dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Karo, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini

menjadi penting untuk mengkaji efektivitas fungsi organizing dalam pelaksanaan ProKlim sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola lingkungan berbasis masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fungsi organizing dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait fungsi organizing dalam organisasi sektor publik, serta memberikan kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program lingkungan berbasis masyarakat secara berkelanjutan.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi tertentu, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta data yang dikumpulkan berupa data kualitatif. John W. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan cara untuk memahami makna yang berasal dari masalah sosial. Proses penelitian dilakukan melalui pengamatan terhadap aktivitas informan, berinteraksi secara langsung, serta memahami perspektif dan pengalaman mereka. Oleh karena itu, peneliti perlu terjun langsung ke lapangan dalam waktu yang cukup untuk memperoleh data yang mendalam (Arsyam & Tahir, 2021). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim), wawancara dilakukan dengan pegawai dan pihak terkait di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2025 hingga Februari 2026 dengan lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a. Efektivitas Fungsi Organizing dalam Program Kampung Iklim (ProKlim)

Penelitian ini berfokus pada efektivitas fungsi organizing dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. Adapun jumlah narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari pejabat dan staf yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Fungsi organizing merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam mengatur pembagian tugas, koordinasi, komunikasi, serta pengarahan agar tujuan program dapat tercapai secara efektif.

Adapun indikator efektivitas fungsi organizing dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim sebagai berikut:

#### 1. Tanggung Jawab Pimpinan

Tanggung jawab pimpinan merupakan faktor penting dalam fungsi organizing, terutama dalam pembagian tugas, koordinasi, dan pengawasan kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, pimpinan telah menjalankan tanggung jawab melalui pemberian arahan, pembagian tugas kepada staf, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ProKlim di lapangan. Pimpinan juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program.

Namun demikian, pembagian tugas antarbidang belum sepenuhnya terstruktur secara sistematis, sehingga pelaksanaan kegiatan masih berjalan secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi organizing belum sepenuhnya optimal, karena koordinasi yang efektif diperlukan untuk menyatukan seluruh kegiatan organisasi agar berjalan selaras (Handayani, 2018).



## **2. Pemberian Motivasi kepada Anggota**

Motivasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja dan partisipasi anggota organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, pimpinan memberikan motivasi melalui pengarahan langsung, pembinaan, serta keterlibatan dalam kegiatan lapangan. Motivasi juga diberikan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi lingkungan.

Upaya tersebut mampu meningkatkan semangat kerja dan tanggung jawab pelaksana program. Hal ini sejalan dengan pendapat Inu Kencana Syafie (2019) yang menyatakan bahwa motivasi berperan penting dalam mendorong aparatur untuk melaksanakan tugas secara optimal. Namun, pemberian motivasi masih bersifat situasional dan belum didukung oleh sistem motivasi yang berkelanjutan.

## **3. Komunikasi Antar Pelaksana**

Komunikasi merupakan elemen penting dalam fungsi organizing karena berperan dalam menyampaikan informasi, arahan, dan koordinasi kerja. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dilakukan melalui rapat kerja, komunikasi langsung, dan media komunikasi seperti WhatsApp. Komunikasi tersebut membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan koordinasi antar pelaksana.

Namun, komunikasi yang berlangsung belum sepenuhnya terstruktur dan belum menjangkau seluruh pihak terkait secara konsisten. Robbins dan Judge (2020) menyatakan bahwa komunikasi yang efektif merupakan faktor utama dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem komunikasi yang lebih terintegrasi.

## **4. Pengarahan dan Tujuan Program**

Pengarahan merupakan bagian penting dalam fungsi organizing karena membantu anggota memahami tugas dan tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, pimpinan telah memberikan pengarahan terkait pembagian tugas, pelaksanaan kegiatan, serta tujuan Program

Kampung Iklim. Pengarahan juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Pengarahan tersebut membantu anggota memahami tanggung jawabnya dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan ProKlim. Oleh karena itu, diperlukan pengarahan yang lebih intensif dan berkelanjutan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

## **b. Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo**

Program Kampung Iklim merupakan program nasional yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Program ini telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo sejak tahun 2020. Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan Program Kampung Iklim sebagai berikut:

### **1. Tepat Program**

Program Kampung Iklim merupakan program yang tepat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup. Program ini bertujuan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dalam pelaksanaannya, program telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam kegiatan pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, dan penghijauan. Namun, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan partisipasi masyarakat.

### **2. Tepat Pelaksana**

Pelaksanaan Program Kampung Iklim melibatkan berbagai pihak, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa, dan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sedangkan masyarakat berperan sebagai pelaksana kegiatan di lapangan.



Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat telah membantu pelaksanaan program. Namun, koordinasi antarbidang dan pihak terkait masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif (Robbins & Judge, 2020).

### 3. Tepat Target

Target utama Program Kampung Iklim adalah masyarakat di wilayah binaan ProKlim. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan program, seperti pengelolaan sampah dan kegiatan kebersihan lingkungan. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum berpartisipasi aktif karena kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya program lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih memerlukan peningkatan sosialisasi dan pembinaan.

### 4. Tepat Lingkungan

Lingkungan kebijakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan ProKlim, Dinas Lingkungan Hidup telah menjalin kerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat. Kerja sama tersebut membantu pelaksanaan program dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Namun demikian, keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar pihak masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan dukungan sumber daya agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis partisipasi masyarakat. Sejak tahun 2020, program ini memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kebersihan lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Fungsi organizing telah diterapkan melalui pembagian tugas, koordinasi, komunikasi, serta pengarahan dan pengawasan oleh pimpinan, sehingga program dapat berjalan sesuai tujuan. Namun, efektivitas fungsi organizing belum sepenuhnya optimal, terlihat dari belum maksimalnya koordinasi antarbidang dan lintas instansi, serta kegiatan yang masih berfokus pada pengelolaan sampah dan belum merata pada aspek lain seperti konservasi air, penghijauan, dan efisiensi energi.

Partisipasi masyarakat juga masih bervariasi, di mana sebagian masyarakat telah berperan aktif, namun sebagian lainnya masih kurang terlibat. Secara keseluruhan, ProKlim telah berjalan dan memberikan manfaat, tetapi masih memerlukan penguatan fungsi organizing agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

### SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

#### 1. Saran Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi *organizing* belum berjalan optimal, sehingga secara teoretis perlu penguatan pendekatan teori organisasi modern, khususnya terkait integrasi struktur dan koordinasi lintas aktor. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan *network governance* untuk melihat bagaimana kolaborasi antarinstansi dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program lingkungan. Temuan penelitian juga mengindikasikan adanya fragmentasi dalam pembagian tugas. Secara teoretis, hal ini dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan perspektif *contingency theory*, yang menekankan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh kesesuaian antara struktur organisasi dan lingkungan

eksternal. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan analisis dengan menggunakan teori *collaborative governance* (Ansell & Gash), guna memperdalam pemahaman tentang keterlibatan masyarakat dalam program berbasis lingkungan seperti ProKlim. Perlu juga penguatan kajian berbasis *good governance*, khususnya pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, untuk menjelaskan bagaimana tata kelola program dapat ditingkatkan secara sistematis.

## 2. Saran Akademis

Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan konsep *organizing* yang lebih kontekstual dalam organisasi publik daerah, khususnya yang berkaitan dengan koordinasi dan pembagian tugas dalam program berbasis masyarakat. Perlu integrasi pendekatan *collaborative governance* untuk menganalisis keterlibatan multi-aktor dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program lingkungan. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan pendekatan *mixed methods* atau studi komparatif antar daerah guna memperkuat validitas temuan dan memperluas generalisasi hasil penelitian.

## 3. Saran Praktis

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo perlu memperjelas struktur organisasi pelaksana ProKlim, terutama dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab antarbidang agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Peningkatan koordinasi lintas instansi perlu dilakukan secara lebih terstruktur melalui forum rutin atau tim koordinasi khusus, sehingga pelaksanaan program menjadi lebih terintegrasi. Sistem komunikasi organisasi perlu diperkuat dengan memanfaatkan teknologi digital agar informasi dapat tersampaikan secara cepat, merata, dan berkelanjutan. Pimpinan organisasi perlu mengembangkan sistem motivasi yang lebih sistematis, seperti pemberian penghargaan bagi desa atau masyarakat yang aktif dalam program ProKlim. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif agar meningkatkan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam program lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Handayani, G. (2018). *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman program kampung iklim (ProKlim)*. Jakarta: KLHK.



- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- O'Toole, L. J. (2015). Networks and networking: The public administrative agendas. *Public Administration Review*, 75(3), 361–371.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis into the age of austerity* (4th ed.). Oxford University Press.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2020). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson Education.
- Siagian, S. P. (2018). *Fungsi-fungsi manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2019). *Ilmu administrasi publik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Terry, G. R. (2017). *Principles of management*. Homewood, IL: Richard D. Irwin.